

## Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah

**M. Kautsar Thariq Syah**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Mkautsarr18@gmail.com

**Paelani Setia**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
setiapaelani66@gmail.com

### Suggested Citation:

Syah, M. Kautsar Thariq; Setia, Paelani. (2021). Radikalisme Islam: Telaah Kampanye Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Pra-Pembubaran oleh Pemerintah. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 1, Nomor 4: pp 523-535. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v1i4.14094>

### Article's History:

Received September 2021; Revised November 2021; Accepted November 2021.  
2021. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

### Abstract:

*This paper will discuss the Khilafah ideological campaign by Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) before the revocation of operational permits by the government in 2017. The opening of the tap for democratization after the fall of the New Order regime led to the proliferation of new mass organizations, including religious organizations. HTI entered Indonesia in the 1980s because of the opportunities due to the opening of the faucet of democracy. They are aggressively carrying out large-scale campaigns to ground their ideology and ideals, namely forming an Islamic state (Khilafah Islamiyah). HTI cleverly campaigns for the caliphate ideology through their significant events, namely in conferences, leaders' conferences, and the My Movement plan for teenagers. In addition, HTI also campaigns for a caliphate through print media, namely Al-Islam, Al-Wa-ie', and Media Ummat. In responding to the challenges of the times, HTI uses social media as another campaign instrument. They also managed to "advertise" their young figures who became new role models for Islam among the millennial generation through social media. The revocation of operational permits by the government marked the end of the offline HTI campaign, although their struggles on social media did not stop. Social media with the principle of openness became the main instrument of HTI's campaign after the government dissolved it.*

**Keywords:** HTI, Islamic caliphate, democratization, social media.

### Abstrak

Tulisan ini akan membahas tentang kampanye ideologi Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelum pencabutan izin operasional oleh pemerintah tahun 2017. Terbukanya keran demokratisasi pasca kejatuhan rezim Orde Baru menyebabkan menjamurnya ormas-ormas baru termasuk ormas keagamaan. HTI masuk ke Indonesia tahun 1980-an karena adanya peluang akibat terbukanya keran demokrasi tersebut. Mereka gencar melakukan kampanye besar-besaran dengan maksud membumikan ideologi dan cita-cita mereka yakni terbentuknya negara Islam (*Khilafah Islamiyah*). HTI dengan lihai mengampenyekan ideologi khilafah melalui acara besar mereka yakni dalam bentuk konferensi, muktamar tokoh, dan agenda Hijrah bagi kalangan remaja. Selain itu, HTI juga mengampenyekan khilafah melalui media cetak yaitu Al-Islam, Al-Wa-ie', dan Media Ummat. Dalam menjawab tantangan kemajuan zaman, HTI menggunakan media sosial sebagai instrumen kampanye lainnya. Melalui media sosial, mereka juga berhasil "mengiklankan" tokoh-tokoh mudanya yang menjadi panutan baru berislam di kalangan generasi milenial. Pencabutan izin operasional oleh pemerintah menjadi penanda berakhirnya kampanye

HTI secara offline, meskipun perjuangan mereka di media sosial tidak berhenti. Media sosial dengan asas keterbukaannya menjadi instrumen utama kampanye HTI pasca dibubarkan oleh pemerintah.

**Kata Kunci:** HTI, khilafah islamiyah, demokratisasi, media sosial.

## PENDAHULUAN

Meskipun akademisi kurang memperhatikan keberadaan dan aktivitas organisasi politik Islam radikal Hizbut Tahrir (HT), kelompok ini telah berkembang menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir (Fealy, 2005). Beberapa penelitian tentang HT telah dilakukan dalam lima tahun terakhir, dan sebagian besar dari mereka mendekati subjek melalui lensa analisis keamanan (Fealy, 2005). Tidak mengherankan bahwa beberapa ahli Barat menggunakan teknik keamanan untuk memastikan keberadaan HT. Namun, beberapa ahli lain yang kurang memahami tentang studi Islam sering menganggap bahwa HT adalah kelompok teroris 'dalam cetakan al-Qaeda' dan menganjurkan pembubaran partai dan pembekuan asetnya (Ehrenfeld & Lappen, 2006). Zeyno Baran (2005), Direktur Program Energi dan Keamanan Internasional Nixon Center, menyebut HT sebagai 'sabuk transportasi teroris' dan 'Islam Bolshevik'. Pada bulan September 2004, ia mengadakan konferensi terbatas berjudul "Tantangan Hizbut Tahrir: Mengungkap dan Memerangi Ideologi Islam Radikal" untuk mempertemukan para akademisi dan menawarkan saran kepada Barat untuk menjauhi HT karena organisasi ini tidak memperhatikan kebebasan beragama.

Demikian pula, Whine (2006), dari Community Security Trust berpendapat bahwa 'anggota HT terus menjadi tempat perekrutan teroris.' Demikian pula, Ariel Cohen dari Heritage Foundation (2003), mencirikan HT sebagai kelompok 'totaliter' yang 'berbagi tujuan dengan al-Qaeda dan organisasi jihad dunia lainnya'. Seperti disebutkan sebelumnya, Rohan Gunaratna (2004), juga menyebut bahwa HT menjalin hubungan dengan Jemaah Islamiyah (JI) dan organisasi HT lokal. Sayangnya, sebagian besar penuduh HT tidak memiliki cukup bukti untuk mendukung tuduhan mereka (Fealy, 2005). Meskipun kurangnya bukti untuk menguatkan klaim ini, terutama tentang adanya hubungan antara Al-Qaeda, JI, dan HT, Indonesia harus lebih berhati-hati mengingat pertumbuhan cepat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Jatuhnya Suharto pada tahun 1998 menciptakan ruang bagi tumbuhnya organisasi-organisasi Islam seperti Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI), yang termasuk di dalamnya HTI. Seperti organisasi Islam lainnya, HTI telah mengembangkan dan mengekspresikan ide-idenya dalam ruang demokrasi terbuka yang diciptakan oleh pemerintah reformasi. Memang, HTI saat ini mengklaim beberapa ratus ribu anggota aktif (sering disebut sebagai *hizbiyyin*) dan pendukung, namun pasca pembubaran oleh pemerintah 2017 aktivitas HTI sudah dilarang dan tidak tampak ke permukaan. Sejak konferensi sedunia *al-khilafah al-Islamiyyah* (khilafah Islam) tahun 2007, yang dihadiri oleh ratusan anggota dan pendukung HTI di Gelora Bung Karno Jakarta, kehadiran partai politik ekstremis HTI telah menarik perhatian publik (Setia, 2021a).

Sejak 29 Februari 2004, ketika lebih dari 50.000 anggota, baik pria maupun wanita berbaju putih dan berjilbab, berbaris di jalan-jalan utama Jakarta, Surabaya, Makassar, dan kota-kota besar lainnya untuk memperingati 80 tahun penghapusan sistem khilafah, publik telah menjadi semakin menyadari agenda HTI. Dengan demikian, tujuan utama HTI adalah untuk membangun kembali kekhalifahan Islam di seluruh dunia berdasarkan syariah (hukum Islam). Pada 12 Agustus 2007, HTI menyelenggarakan Konferensi Khilafah Internasional yang diikuti oleh anggota HT dari seluruh dunia. Pertemuan itu menarik lebih dari 100.000 orang ke Jakarta. Yang membedakan mereka bukanlah ukuran mereka, tetapi masalah mereka. Di antara banyak organisasi politik Islam di Indonesia yang dipengaruhi oleh sumber-sumber Timur Tengah, "HTI adalah satu-satunya organisasi yang dikendalikan oleh kepemimpinan asing yang memperoleh ideologinya secara eksklusif dari sumber-sumber Timur Tengah dan mengejar tujuan transnasional yang sejati" (Fealy, 2005).

Untuk hal ini, dapat dikutip di sini pendapat ideolog HTI (Taqiuddin An-Nabhani, 2011): "Kaum imperialis meracuni rakyat (umma) dengan nasionalisme, patriotisme, dan sosialisme, dan, seperti halnya pemahaman terbatas tentang tanah dan negara, mereka diracuni dengan khayalan bahwa menciptakan Daulah Islamiyah (negara Islam) tidak mungkin. Dan sulit untuk membangun persatuan di antara berbagai bangsa Islam dengan budaya, suku, dan bahasa mereka yang berbeda, meskipun mereka adalah orang-orang yang disatukan oleh aqidah Islam yang melahirkan tatanan Islam (*nizam al-Islam*)".

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada periode pasca-Soeharto dan kampanye ideologisnya di era yang semakin modern. Kesimpulannya, HTI melakukan kampanye ideologi secara langsung maupun tidak langsung (offline dan online). Ini selanjutnya akan melihat bagaimana HTI, lebih dari mayoritas kelompok Islam lainnya, mendapat untung dari kematian rezim. Ada pandangan yang berkembang di

masyarakat luas bahwa perubahan politik, ekonomi, dan hukum era reformasi tidak banyak berpengaruh pada peningkatan kehidupan sehari-hari masyarakat. Memburuknya keadaan di bawah pemerintahan pasca-Suharto telah memperkuat argumen HTI bahwa Indonesia membutuhkan sistem yang radikal dan lengkap, atau yang disebut HTI sebagai khilafah al-Islamiyyah (khilafah Islam). Untuk memahami tujuan HTI, kita harus mengkaji sejarah, filosofi, dan tujuan HTI.

Artikel ini akan dimulai dengan memberikan gambaran singkat tentang organisasi tersebut. Kemudian akan mengkaji tujuan ideologis HTI untuk memastikan bagaimana pandangannya terhadap persoalan-persoalan terkini seperti demokrasi, negara-bangsa, dan nasionalisme. Setelah itu, tulisan akan diarahkan untuk melihat sejauh mana kampanye HTI dapat berjalan melalui acara berskala besar dan upaya media sosial. Akhirnya, esai ini akan berargumentasi bahwa, berdasarkan penjelasan kerangka ideologis HTI secara keseluruhan, terutama tujuan utamanya membangun kembali khilafah global dan penolakannya terhadap negara-bangsa dan demokrasi, seperti yang dimanifestasikan dalam agenda aktivitas dan mobilisasi media sosialnya, organisasi ini telah menjadi penghalang langsung bagi sistem demokrasi yang sedang dibangun. Dengan demikian, pada titik ini, pembubaran HTI oleh pemerintah pada tahun 2017 merupakan upaya yang tepat sasaran.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang dilakukan berbasis virtual etnografi (Hine, 2008). Atau observasi yang dilakukan secara online terhadap akun dan media sosial Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai sumber primer. Observasi ini dilakukan dengan tujuan menganalisa aktivitas HTI dalam upaya kampanye ideologis penyebaran paham *khilafah* untuk mengelabui masyarakat dan publik ditengah menurunnya kehidupan masyarakat seperti kemiskinan, korupsi, dan keadilan hukum. Selain itu, tujuan dilakukan observasi online adalah untuk melihat bagaimana efek dari kampanye HTI. Selanjutnya, untuk memperoleh data yang lengkap dilakukan dengan mengkaji literatur berupa buku, jurnal, kitab HTI, buku yang ditulis oleh anggota HTI dan referensi lainnya yang disebarakan anggota HTI melalui media sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Singkat Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 di Yerusalem Timur oleh Taqiyuddin an-Nabhani. Pada tahun 1977, Taqiyuddin an-Nabhani wafat dan digantikan oleh Abdul Qadeem Zaloom sampai beliau wafat pada April 2003. Kemudian, Ata Abu-Al-Rushta, mantan juru bicara Hizbut Tahrir di Yordania menggantikannya hingga saat ini (Karagiannis & McCauley, 2006). Hizbut Tahrir telah menyebar di 50 (lima puluh delapan) negara, baik di negara menganut Islam seperti Kazaktan, Uzbekistan, Pakistan, Mesir, Sudan, Aljazair, Libya, Irak, Malaysia dan Indonesia (Delphine Alles, 2015). Ataupun negara yang minoritas Islam seperti Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Spanyol, Kanada, dan Amerika Serikat (Shobron, 2014). Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia sekitar tahun 1982. Berawal dari pertemuan antara Abdullah Bin Nuh—pimpinan pesan al-Ghazali dan seorang aktivis yang berasal dari Lebanon Abdurahman al-Baghdadi yang saat itu sedang kuliah di Australia. Abdurahman datang ke Bogor untuk mengajar di Pondok Pesantren al-Ghazali dimana banyak dari santrinya yang menjadi mahasiswa di Institut Pertanian Bogor (IPB) (Osman, 2009). Lebih jauh, mahasiswa yang telah menerima dakwah tentang seluk beluk HT memiliki tugas memperkenalkan HT kepada aktivis mahasiswa lain di luar perguruan tinggi yang aktif di Lembaga Dakwah Kampus (LDK) (Shobron, 2014).

Semenjak lahirnya orde Reformasi, Hizbut Tahrir telah menjadi organisasi yang paling menonjol menuntut pembentukan khilafah global di bawah penerapan syariah. Keanggotaannya di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan ribu. Organisasi ini mendapat dukungan utama dari kalangan pelajar dan profesional terdidik di pusat-pusat perkotaan Indonesia. Meskipun, tuntutan mereka untuk melawan apa yang mereka klaim yaitu sistem sekuler-kapitalis-nasionalis sangat kontroversial, tetapi jumlah keanggotaan dan kelompok yang mendukung ideologinya terus meningkat (Al-Rasheed et al., 2012).

Pada tahun 2001, Hizbut Tahrir menambahkan 'Indonesia' ke nama partainya sehingga menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, perubahan ini tidak dimaksudkan untuk membuat partai menjadi otonom atau menjadi membatasi fokusnya ke Indonesia saja. Mereka mungkin satu-satunya organisasi di Indonesia yang hanya merupakan cabang lokal (atau 'provinsi') dari gerakan internasional (Ward, 2009).

Pada tanggal 8 Mei 2017, seorang purnawirawan TNI Jenderal Wiranto, yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa setelah mengkaji dengan cermat, pemerintah akan memulai proses hukum untuk mengumumkan bahwa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menjadi organisasi terlarang di seluruh negeri. Wiranto mengatakan alasan pelarangan organisasi

tersebut karena ideologi HTI yang mempromosikan kekhalifahan Islam global bertentangan dengan ideologi nasional Indonesia, Pancasila (Arifianto, 2017). Pemerintah membubarkan HTI dengan landasan Peraturan Pemerintah di Undang-Undang Nomor (Perppu) 2 Tahun 2017 yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat Sipil (CSO). Melalui Perppu ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk melarang organisasi yang “menyebarkan doktrin ideologis atau filosofis yang melanggar Pancasila dan UUD 1945”, salah satunya HTI. Pasca terbitnya Perppu tersebut, HTI dan sejumlah pihak mengajukan protes. Bahkan, HTI menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas Perppu yang dikeluarkan Pemerintah itu (Zaim, 2019). Namun, upaya HTI tersebut gagal karena gugatannya ditolak Mahkamah Agung. Dengan demikian, semenjak 2017 hingga sekarang, HTI resmi tidak memiliki izin operasional kembali alias aktivitasnya dilarang oleh pemerintah (Burhani, 2017).

### Tujuan Kampanye Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir memiliki visi utama sebagai organisasi dakwah (Firdaus, 2018). Tujuan HTI melakukan dakwahnya adalah mengingatkan kembali kepada seluruh umat Muslim di dunia untuk kembali ke dalam kehidupan Islam melalui tegaknya Daulah Islam (Taqiyuddin An-Nabhani, 2001). HTI adalah organisasi yang paling vokal dan secara ekstensif menyebarkan perlunya pemulihan khilafah (kekhalifahan) tunggal dan universal bagi semua Muslim di dunia (Muhtadi, 2009). Karena HTI adalah organisasi dakwah yang berasaskan ideologi Islam, maka mereka menggunakan akidah Islam dalam mengadopsi hukum-hukum syara'. Hizbut Tahrir meneladani *thariqah* (metode) yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw dalam penegakan Daulah Islamiyah di Madinah dan menjadikannya sebagai *thariqah* untuk mengembalikan Khilafah. Hal itu dilakukan karena Islam adalah agama yang sempurna yang di dalamnya terdapat berbagai macam hukum, dan interaksi antar sesama manusia, seperti sistem sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya (Dodiman, 2012). Aturan-aturan ini meniscayakan adanya negara yang akan melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan tersebut kepada manusia (Abdullah, 2014). Dengan demikian, HT menyimpulkan bahwa sebagai umat Muslim memiliki kewajiban menerapkan kehidupan Islam secara *kaffah* salah satunya adalah menegakan negara khilafah (Belhaj, 2015).

Dalam ketatanegaraan Islam, sistem khilafah dan sistem pemerintahan Islam adalah dua ungkapan yang memiliki *mafhum* (pemahaman) yang berbeda, tetapi memiliki *mashadaq* (substansi) yang sama. Artinya, sistem khilafah dan sistem pemerintahan Islam secara bahasa memiliki pengertian yang berbeda, tetapi bermuara pada maksud dan tujuan yang sama. Disebut sistem pemerintahan Islam karena bertujuan atau berorientasi pada terwujudnya syariat Islam serta dibangun atas prinsip-prinsip Islam (Muhajir, 2017). Didalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat (Zainuddin, 2018). Dengan demikian, amat wajar jika HT menolak dengan tegas system demokrasi karena bagi mereka, sistem pemerintahan yang sah hanyalah khilafah.

Setelah kekhalifahan Utsmani runtuk pada tahun 1924, banyak dari negara-negara Muslim mulai menggunakan sistem demokrasi. Bahkan, dalam perkembangannya sistem demokrasi di negara-negara Islam Arab begitu pesat. Meski berjalannya demokrasi di negara-negara Islam lebih lambat dari negara-negara non-Islam, tetapi tetap ada titik cerah dalam perkembangan demokrasi di dunia Islam (Pranowo, 2006). Demokrasi merupakan perencanaan institusional, mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh perjuangan kompetitif atas suatu rakyat (Esposito & John O. Voll, 1996). Prinsip demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dengan semboyan “from the people, by the people, and for the people”, maka segala keputusan hukum dan politik merupakan “jerih payah” rakyat dan segala keputusan yang dikeluarkan oleh badan legislatif dianggap mencerminkan kehendak umum dari seluruh rakyat (Hirzi, 2005).

Walau demikian, sistem demokrasi sangat berbeda dengan sistem kekhalifahan. Karena di dalam sistem Khilafah, Allah-lah yang membuat peraturan hidup bukan rakyat. Islam mengatur segala tingkah laku manusia baik untuk dirinya maupun sesamanya (Arief B. Iskandar, 2015). Diantaranya adalah tidak diperbolehkan bagi seorang Muslim untuk memeluk keyakinan lain, baik itu yang didasarkan pada agama yang diwahyukan secara asli, seperti Yudaisme dan Kristen, atau keyakinan ideologi lain, seperti kapitalisme atau sosialisme, atau keyakinan apa pun dari cara hidup apa pun. Atau pemikiran apapun selain dari akidah Islam (Hannah, 2009).

Bagi Hizbut Tahrir, sumber utama dari undang-undang dasar dan undang-undang Islam adalah Al-Quran dan As-Sunah, bukan yang lain. Tempat lahirnya sebuah hukum adalah ijihad para mujtahid. Khalifah akan melegalisasi hukum-hukum tertentu dari hasil ijihad tersebut dan memerintahkan rakyat untuk melaksanakannya. Selanjutnya, kedaulatan menurut Islam hanya milik syara'. Sedangkan ijihad untuk menggali hukum-hukum syara' adalah hak bagi seluruh kaum Muslim, yang hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi, hanya Khalifah saja yang berhak

melegalisasi hukum-hukum syara' tersebut (Taqiuddin An-Nabhani, 2011). Dari sini tampak jelas bahwa tidak ada pilihan bagi kaum Muslim dalam masalah penetapan hukum dan peradilan. Semuanya dikembalikan kepada Allah Swt dan kepada Rasulullah Saw. Inilah yang dimaksud dengan merujuk kepada Kitabullah yakni al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw (Shalih, 2010). Dengan demikian, Hizbut Tahrir berkesimpulan bahwa menegakkan khilafah adalah tugas yang luar biasa beratnya, melakukan perjuangan yang terus-menerus yang tidak mengenai lalai atau mundur, menuntut pengorbanan yang sangat banyak, dan untuk merealisasikannya sangat diperlukan keikutsertaan seluruh kaum muslimin (Khalid, 2015).

### **Strategi Penyebaran Khilafah oleh Hizbut Tahrir Indonesia**

Menurut Hizbut Tahrir, ketika opini masyarakat sudah terbentuk untuk menginginkan Islam yang muncul sebagai jawaban dari sebuah masalah yang ada, karena masyarakat sudah menyadari bahwa demokrasi adalah sistem yang rusak, maka tidak ada lagi yang bisa menahannya. Agama lain saja memiliki filosofi bahwa kebohongan kalau disampaikan secara terus menerus itu akan menjadi kebenaran, seperti halnya demokrasi atau pluralisme jika disampaikan secara terus menerus, disampaikan lewat segala macam media, seperti media cetak dan media sosial dan semua tokoh membicarakan tentang baiknya demokrasi maupun pluralisme akhirnya masyarakat akan menganggap hal itu baik (Anwar, 2010). HTI memiliki pandangan bahwa demokrasi sebagai sistem yang *jahili* (ketidaktahuan) dan tidak Islami. Mereka meyakini bahwa ketika manusia membuat hukumnya sendiri merupakan perampasan langsung *hakimiyyah* (kedaulatan) Tuhan. Karena itu, mereka tidak akan memilih sistem pemilihan umum. Menurut mereka Muslim yang percaya pada demokrasi dianggap sebagai orang yang kufur, kafir, atau bahkan murtad, dan mereka yang telah menyimpang dari iman (Valentine, 2010).

Oleh karena itu, penerapan syariah oleh HTI menjadi suatu keharusan. Dengan pemahaman ini, HTI secara gamblang mendeklarasikan gagasan anti sekularisme dan mengkampanyekan pelarangan sekularisme (Maksum, 2017). Oleh karena itu, menjadi penting bagi Hizbut Tahrir untuk merebut opini publik, karena memang itu akan sangat mempengaruhi masyarakat kedepannya. HTI memperkuat kehadiran dan mobilisasinya bersama program yang secara langsung menjangkau ke masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan kelompok halqah, pembinaan kader potensial, dan kunjungan ke pimpinan lembaga atau organisasi (Ahnaf, 2009). Dengan pergerakan yang terarah dan dirancang berdasarkan kajian secara sungguh-sungguh terhadap keadaan lingkungannya, HTI meyakini usahanya akan membuahkan hasil. Untuk menjaga keamanan internal, pengawasan dilakukan secara penuh agar organisasi tidak disusupi oleh unsur yang merusak, dan agar tidak terjadi kesalahan dalam menyusun struktur organisasi. Dengan demikian, organisasi ini tidak mau tergelincir pada pandangan yang bukan pandangannya yang berdampak pada kehancuran internalnya (Taqiuddin An-Nabhani, 2016).

Hizbut Tahrir Indonesia mendapatkan gerak yang bebas dan leluasa pada fase sebelum dibubarkan oleh pemerintah. Adanya keran kebebasan akibat demokratisasi membuka kesempatan bagi setiap kelompok untuk menyuarakan gagasan dan ideologinya, terutama HTI (Setia, 2021b). Hal ini menjadi kritik tersendiri bagi HTI karena bersikap inkonsistensi. Pada satu sisi, HTI adalah organisasi yang terang-terangan menolak demokrasi, namun di sisi lainnya mereka memanfaatkan keleluasaan dan kebebasan berekspresi dalam menyebarkan ideologinya (Muhtadi, 2009). Akibatnya, ruang yang ada dimanfaatkan oleh HTI untuk mengkampanyekan secara luas gagasan tentang khilafahnya. HTI secara terang-terangan mengadopsi dua sistem kampanye, yakni secara konvensional (offline) dan secara online. Meskipun, pasca dibubarkan pemerintah, HTI mengadopsi sistem kampanye online karena tidak lagi memperoleh ruang gerak secara langsung. Berikut ini strategi kampanye Hizbut Tahrir Indonesia yang dilaksanakan secara konvensional yang meliputi acara-acara besar atau kegiatan-kegiatan HTI dengan jumlah peserta yang banyak.

## **1. Pelaksanaan Acara Besar HTI**

### **a. Konferensi Islam dan Peradaban 2014**

Pada 27 Mei 2014, HTI melaksanakan konferensi Islam dan peradaban yang diklaim dihadiri oleh 10.000 peserta dan bertempat di Sentul International Convention Center di Bogor. Peserta terdiri dari berbagai latar belakang seperti cendekiawan, politikus, ustaz, mahasiswa, dan ibu rumah. Acara tersebut mengambil tema, "*Saatnya Khilafah Mengganti Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal* (HTI, 2014). Acara ini bertujuan untuk menyatukan visi sekaligus silaturahmi akbar pengurus dan anggota HTI dari seluruh penjuru tanah air. Selain itu, acara ini juga berisi orasi-orasi para pemimpin dan cendekiawan HTI. Salah satunya orasi dari juru bicara HTI, Ismail Yusanto. Menurut laporan dari tabloid media Ummat edisi Juni 2014, ditulis isi dari orasi tokoh HTI ini yaitu urgensi Indonesia sebagai pusat pergerakan Hizbut Tahrir dunia. Hal ini menurut Ismail, karena Indonesia akan menjadi titik sentral bangkitnya kesadaran akan pentingnya khilafah. "Jangan ragu bahwa kita, umat Islam di

Indonesia menjadi pelopor akan bangkitnya khilafah dunia” (Lihat, Media Ummat edisi Juni 2014). Selain itu, acara ini juga menegaskan kesungguhan mereka pada upaya menyebarkan ideologi khilafah ke pelosok negeri. Makanya, acara ini mengusung tema Islam dan Peradaban sebagai ciri bahwa sebuah peradaban baru akan lahir dan diadopsi oleh seluruh masyarakat Muslim. Kesungguhan ini sesuai dengan pesan pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyudin An-Nabhani dalam bukunya, Mafahim Hizbut Tahrir. “Penegakan Daulah merupakan tanggung jawab seluruh umat Islam, karena kedatangannya sudah digariskan oleh Allah. Sebagai manusia yang beriman kepada Allah, maka sudah kewajiban menyambut dan menegakkan Islam dengan bersungguh-sungguh. Inilah yang membedakan suatu kaum (Muslim) berkualitas dihadapan Allah” (Taqiyuddin An-Nabhani, 1996).

Dengan demikian, wajar jika HTI dengan penuh semangat menyelenggarakan acara ini. Apalagi, pemerintah yang sedang berkuasa saat itu tidak menunjukkan adanya resistensi kepada mereka. Respons masyarakat juga masih biasa dan belum menganggap acara ini sebagai sebuah ancaman bagi jalannya demokrasi di Indonesia. Dalam teori politik, konteks HTI ini merupakan bagian dari adanya peluang politik. Peluang politik ini berupa adanya kesempatan politik yang bisa oleh suatu gerakan sosial di dalam suatu Negara (Tilly, 1979). Hal ini bisa diwujudkan dalam tiga aspek, yakni keterbukaan politik, stabilitas politik, dan afiliasi politik.

*Pertama*, dalam aspek keterbukaan politik, adanya sistem demokratisasi yang terbuka pasca runtuhnya orde baru merupakan satu kesempatan terbuka yang bisa dimanfaatkan HTI. HTI menjelma menjadi sebuah gerakan massa Islam yang memiliki jumlah pengikut yang banyak. Tidak ada yang bisa melarang mereka, karena kehidupan demokrasi menghendaki perbedaan berpendapat dan berserikat. Makanya, tren berkembangnya organisasi-organisasi masyarakat menguat pasca reformasi berdiri. *Kedua*, dalam aspek stabilitas politik, HTI juga mampu memanfaatkan situasi ini dengan baik. Sebuah negara yang stabil dalam politik tentu didukung oleh tingginya kebebasan berpendapat setiap warganya. Setiap pendapat dijamin oleh konstitusi, tidak boleh ada monopoli atas pendapat orang lain. Dalam situasi ini, Indonesia mengalami manfaat besar akibat sistem demokrasi pasca runtuhnya rezim orde baru, yakni terwujudnya stabilitas politik. Akibatnya, setiap orang dengan bebas bisa mendirikan organisasi atau perserikatan karena tidak ada konflik dalam politik negara. *Ketiga*, afiliasi kelompok. Pada konteks ini, meskipun sulit menilai HTI berafiliasi dengan salah satu partai politik parlemen, namun jaminan atas kedua unsur tadi sudah bisa mengantarkan mereka pada ormas yang berdiri dan tumbuh akibat adanya sistem demokrasi. HTI memang menolak sistem parlemen atau sistem konstitusional karena dianggap bertentangan dengan Islam, namun dari segi tujuan gerakannya mereka mengidentifikais diri sebagai partai politik. Pada titik ini, sekali lagi HTI menunjukkan sikap inkonsistensinya, terutama pada sistem demokrasi. Jikalau mereka menolak seutuhnya demokrasi, maka konsekuensinya adalah menghindari cara-cara yang dihasilkan dari demokrasi itu sendiri, termasuk menghindari untuk menikmatinya. Namun pada kenyataannya mereka justru sebaliknya.

#### b. My Movement 2015

Terkhusus pada kalangan remaja, HTI pernah mengadakan yang sangat besar pula. Acara ini dilaksanakan oleh Lembaga Dakwah Sekolah (LDS) HTI seluruh Indonesia dengan nama My Movement. Acara ini dilaksanakan pada tanggal 8 Febuari 2015 dengan tema, “*Kamilah Pemimpin Masa Depan*”. Acara tersebut memberikan sebuah pesan moral kepada remaja bahwasanya remaja harus membuka mata antara fakta dan kenyataan tentang kebobrokan moral remaja saat ini. Para remaja harus paham bagaimana menjadi orang sukses yang sesuai dengan harapan orang tua. Acara ini diselingi dengan kisah-kisah keberhasilan Nabi dalam berdakwah di usia muda, kemudian kisah-kisah para Sahabat yang berdakwah di usia mudanya, mulai dari Ali bin Abi Thalib (8 tahun), Mushaba bin Umair (24 tahun), Thalhan bin Ubaidillah (11 tahun), Al Arqam bin Abil Arqam (12 tahun) dan masih banyak lagi. HTI menaruh harapan kepada generasi muda karena memiliki potensi yang sangat besar sebagai salah satu elemen masyarakat yang memiliki potensi yang luar biasa (Wulandari, 2015).



Gambar 1: Acara My Movement 2015 (sumber, HTI.com)

Salah satu LDS yang mengadakan acara ini yakni LDS Kota Bogor, Jawa Barat. Khusus di kota Bogor, acara ini dilaksanakan di SMA IT Insantama, Bogor. Acara dihadiri oleh seluruh perwakilan LDS Kota Bogor. Tidak kurang dari perwakilan LDS di 15 kecamatan di Kota Bogor turut hadir meramaikan acara ini. Dalam salah satu sumber laporan pihak sekolah, penulis mendapati fakta bahwa acara ini langsung disponsori oleh HTI Kota Bogor. Bahkan, beberapa narasumber yang dihadirkan juga merupakan tokoh dan cendekiawan HTI pusat. Mereka dihadirkan dengan tujuan memberikan motivasi kepada remaja dan pelajar untuk mengobarkan semangat mendakwahkan khilafah di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitarnya. Tidak lupa, mereka juga dibekali dengan tips dan trik mengontak (mengajak) teman atau sahabatnya untuk mengkaji Islam di HTI. Acara ini kian semarak setelah dihadirkan beberapa musik nasyid dari setiap perwakilan LDS Kota Bogor.

Selanjutnya, tema "*Kamilah Pemimpin Masa Depan*", dipilih untuk merefresentasikan remaja-remaja HTI tentang kesiapan mereka sebagai insan yang siap mengarungi kehidupan dengan ketaatan pada komitmen mengampanyekan syariah dan khilafahnya. Apalagi, mereka juga sekaligus menasbihkan diri sebagai remaja-remaja yang jauh dari perilaku negative dan buruk yang identic dengan para remaja lainnya dengan perilakunya yang buruk dan merusak generasi bangsa. HTI meyakini bahwa kemerosotan moral yang terjadi di Indonesia juga disebabkan karena pembinaan dan pendidikan para remaja yang tidak tepat atau bahkan melenceng dari Islam. Mereka selalu menyoroti maraknya pergaulan bebas yang dilakukan remaja di Indonesia yang dinilai akan merusak citra Islam. Karenanya, berdasarkan penelusuran penulis HTI seringkali mengadakan kampanye dan petisi penolakan aksi pergaulan bebas oleh mahasiswa dan pelajar di beberapa kampus, misalnya di Bogor, Jakarta, dan Bandung.

### c. Mukhtar Tokoh Umat (MTU) 2016

Acara lain yang sifatnya besar yang diselenggarakan oleh HTI adalah Mukhtar Tokoh Umat (MTU). Sekitar 1.300 tokoh dari Bogor, Sukabumi dan wilayah Jawa Barat lainnya mengikuti agenda ini yang diselenggarakan di Hotel Brajamustika, Bogor. Namun demikian, acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh ulama atau tokoh agama saja melainkan dihadiri juga oleh berbagai kalangan seperti takmir masjid, tokoh masyarakat, intelektual, pengusaha, dokter, perwakilan partai politik, wartawan, tokoh mahasiswa, dan lain-lain (Erwin Wahyu, 2016). Acara ini dilaksanakan selain sebagai ajang kampanye khilafah yang utama, juga bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan tentang pentingnya Islam memimpin negeri. Harapannya, kehadiran tokoh agama dan kalangan profesional serta para tokoh pemuda, tujuan HTI dalam menyadarkan umat cepat terlaksana. Memang, hal ini logis karena melalui para tokoh dan ulama-lah biasanya masyarakat bisa tersadarkan. Strategi ini dipandang sangat penting oleh HTI karena tokoh dan ulama adalah jantung masyarakat.

Dalam perspektif sosiologis, agama memang merupakan pengikat masyarakat (Durkheim, 2011). Agama berperan layaknya alat perekat agar individu-individu tidak keluar dari komunitasnya. Doktrin agama dan pesan agama menghendaki seseorang untuk tetap setia ada dalam komunitas agama karena kehidupan yang baik adalah kehidupan yang kolektif. Hal ini pula yang dilakukan HTI dimana solidaritas kelompok menjadi kunci gerakannya. Adanya acara Mukhtar Tokoh sejatinya bertujuan menjaga loyalitas dan memanifestasikan agama sebagai sebuah pengikat kehidupan. HTI sadar bahwa, dengan mengumpulkan tokoh agama, bahkan dari lintas ormas akan memperkuat soliditas diantara mereka atas kesamaan sebagai sebuah komunitas besar yakni Islam. Harapan akhirnya adalah keseragaman akan pemahaman dan keyakinan pada penegakkan sistem khilafah.

## 2. Kampanye Khilafah Melalui Media Cetak

Selain melalui kampanye secara konvensional atau melalui acara-acara besar dan *halqah*, HTI juga melakukan kampanye khilafah melalui media cetak. Media cetak ini merupakan ajang bagi para anggota untuk membaca dan mendialogkan ide-ide gerakannya dan terutama mempropaganda publik luas untuk mengetahui lebih dalam ide khilafah yang dipasarkan. Kampanye melalui media cetak berupa buku terjemahan karya pendiri Hizbut Tahrir—Taqiyudin An-Nabhani, yaitu *Shakshiyah Islamiyah* (Kepribadian Islam), *Fikr al-Islam* (Pemikiran Islam), dan *Nizam al-Islam* (Sistem Islam), dan media cetak yang diproduksi HTI yakni Buletin Al-Islam dan jurnal Al-Wa"ie (Hilmy, 2014). Sebanarnya, media yang digunakan oleh organisasi HTI ini terbagi dua yaitu media massa cetak dan media massa elektronik. Pilihan dua jenis media ini sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Media massa elektronik digunakannya pada untuk kampanye terhadap masyarakat yang telah menguasai media sosial seperti di perkotaan. Sedangkan media cetak digunakannya sebagai sarana untuk berkampanye kepada orang-orang yang masih belum menguasai media massa elektronik seperti di daerah perdesaan dan masyarakat yang tidak menggunakan media sosial. Meskipun demikian, penggunaan media cetak lebih efektif sebagai instrumen kampanye karena media ini mencirikan pembacanya sebagai kader atau anggota

yang loyal dengan usahanya untuk tetap berkomitmen membeli dan membaca media cetak di era yang sudah serba digital. Berikut ini beberapa media cetak yang digunakan HTI dalam kampanye khilafah mereka.

**a. Al-Islam**

Media cetak pertama yang paling dikenal luas publik adalah Al-Islam. Al-Islam terbit setiap hari jumat dan diedarkan pada masjid-masjid di seluruh Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan Al-Islam dikenal luas sebagai media opini Hizbut Tahrir di Indonesia karena kehadirannya di masjid-masjid turut menyita jemaah masjid sebagai media yang kritis sehingga banyak dibaca sebagai renungan. Al-Islam senantiasa mengupas masalah-masalah yang menjadi berita utama di media-media massa, seperti masalah politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Al-Islam berupaya mempengaruhi pembaca dengan ideologi yang diyakini HTI paling benar, yakni khilafah. Dalam upaya mempengaruhi pembaca dengan ideologi tersebut, wacana Al-Islam menggunakan satu isu tertentu yang kemudian harus diselesaikan melalui sistem pemerintahan Islam (Budiman et al., 2016). Oleh karenanya, media tersebut sangat efektif untuk mempersuasi opini publik karena berangkat dari kemerosotan kehidupan masyarakat. Sehingga apabila tidak didukung oleh literasi yang kuat dan daya kritisisme mumpuni, bisa saja masyarakat yakin bahwa penegakan sistem pemerintahan dengan mengusung sistem khilafah dapat mengurangi indikasi kemerosotan yang muncul di era sekarang ini (Sabari, 2017).



Gambar 2: Buletin Dakwah Al-Islam

Lebih jauh, media cetak Al-Islam ini mengalami perubahan nama setelah HTI resmi dibubarkan pemerintah. Nama Al-Islam akhirnya diganti untuk menutupi identitas jelas dari media ini, khususnya untuk menjaga agar media cetak tersebut diterima masjid-masjid di Indonesia. Nama yang baru adalah Kaffah, nama ini sekaligus merepresentasikan perlunya penegakkan Islam secara kaffah (komprehensif) seperti visi utama Hizbut Tahrir yang ingin mewujudkan Islam sebagai sistem pemerintahan dan sistem kehidupan sepenuhnya. Di dalam nama barunya, media ini tidak lagi mencantumkan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai identitas resmi pemilik media namun menggantinya dengan nama Lembaga Dakwah Islam. Alasannya tentu untuk menghindari “pembredelan” oleh pemerintah atau ormas lain karena izin operasional HTI sudah resmi dicabut pemerintah.

**b. Media Ummat**

Selanjutnya, terdapat Tabloid Media Umat (MU) sebagai instrument lain dalam kampanye HTI. Tabloid ini berbentuk cetak dan dikeluarkan sebanyak dua kali dalam satu bulan. Tabloid Media Umat (MU) merupakan salah satu media utama HTI merupakan media Islam dengan motto “Melanjutkan Kehidupan Islam”. Media ini memfokuskan pada analisis peristiwa atau berita dengan kacamata Islam dan memihak kaum Muslim. Penyebaran tabloid ini dilakukan menyasar kepada anggota dan sasaran lainnya yang dianggap berpotensi bergabung dengan HTI. Media Umat ini biasanya diberikan kepada simpatisan dan masyarakat umum (Setia, 2020). Tabloid ini secara umum selalu mendeskripsikan bahwa sistem Barat dan ide-ide yang tidak islami harus disingkirkan dan kehidupan islami wajib dilanjutkan kembali dengan penerapan hukum-hukum syariah yang lurus melalui kekuasaan, yang eksistensinya telah diwajibkan oleh syariah, yaitu *Daulah Khilafah* (Mulyar, n.d.).



Gambar 3: Media Umat

Sama seperti media Al-Islam, karakter Tabloid Media Umat juga selalu mengupas isu-isu aktual dalam masyarakat yang dikupas dalam perspektif Islam. Namun demikian, media ini jelas berbeda dengan Al-Islam karena berisi tema-tema dan focus lainnya layaknya koran-koran yang dikeluarkan media besar di Indonesia. Di dalamnya berisi tentang wawancara tokoh, kajian keluarga, kajian hukum ekonomi Islam, dan kajian khusus yang biasanya diletakkan di halaman depan tabloid ini. Maka demikian, media cetak ini biasanya digunakan sebagai sarana untuk “mengontak” atau mengajak simpatisan atau individu yang mulai tertarik dengan HTI. Mereka akan diberikan tabloid dengan tujuan memperlihatkan bahwa HTI memang memiliki cita-cita mewujudkan sistem Islam komprehensif seperti komprehensifnya bahasan dalam tabloid tersebut.

### c. Majalah Al-Wa'ie

Media selanjutnya yang menjadi instrumen kampanye HTI adalah Majalah Al-Wa'ie. Al-Wa'ie merupakan media dakwah dan politik yang secara resmi diterbitkan oleh Hizbut Tahrir Indonesia kurang lebih sejak tahun 2000. Majalah ini mempunyai motto “Membangun Kesadaran Umat” dengan penekanan kajian politik dan dakwah Islam. Majalah ini merupakan sarana pelengkap kampanye Hizbut Tahrir Indonesia disamping kedua media utama sebelumnya. Sama halnya dengan tabloid Media Umat, majalah ini berisi opini-opini khas HTI dengan menawarkan khilafah sebagai solusi atas permasalahan negara. Al-Wa'ie juga tidak terlepas pada bahasan kehidupan Muslim di bidang ekonomi, politik (nasional dan internasional), pemerintahan, ekonomi (lokal dan global), pendidikan, masyarakat dan budaya, serta keamanan internasional (Farida, 2017).



Gambar 4: Majalah Al-Wa'ie

Lebih jauh, majalah Al-Wa'ie memberikan kesan istimewa karena tulisan-tulisan di dalam majalah ini biasanya merupakan tulisan para petinggi HTI dan hasil kajian mendalam para cendekiawan HTI. Mereka biasanya mengupas suatu tema khusus yang merupakan inti dari edisi majalah ini. Kemudian, di dalam majalah ini juga berisi tentang tulisan-tulisan yang lebih teknis mengenai bagaimana penerapan Khilafah Islam itu dilaksanakan. Atau secara sederhana, majalah ini berisi kajian mendalam mengenai bahasan pokok yang terdapat dalam kitab-kitab utama Hizbut Tahrir seperti kitab Mafahim dan Takatul Hizbi. Misalnya, dalam satu edisi di bulan Juni 2018, dibahas mengenai fase-fase kapan khilafah mulai bisa diterapkan yakni mulai dari fase dakwah merangkul umat, berinteraksi dengan umat, sampai pada penegakkan kepada umat secara masif.

### 3. Kampanye Khilafah Melalui Media Sosial

#### a. Situs HTI

Situs Hizbut Tahrir Indonesia (<https://hizb-indonesia.online/>), adalah situs resmi Hizbut Tahrir Indonesia yang berisi informasi kegiatan organisasi termasuk berita, opini, dan konten buku terkait ekspansi politik HTI. Jargon utama situs ini adalah, "Untuk Melanjutkan Kehidupan Islam", yang bermakna adanya upaya untuk kembali menegakkan Islam sebagai dasar kehidupan (Hayati, 2017). Sebagai sebuah situs resmi, situs ini menawarkan kepada pengunjung tentang informasi HTI selengkap-lengkapnyanya, mulai dari sejarah, tujuan, hingga media-media yang digunakan sebagai instrumen kampanye khilafah. Selain itu, situs ini juga menawarkan kepada pengunjung untuk memperoleh kitab-kitab HTI versi online (*e-book*) untuk dibaca dan dikaji secara mendalam (Hernandez, 1999). Selanjutnya, penggunaan situs ini cukup efektif bagi para anggota karena informasi resmi mengenai aktivitas kegiatan biasanya dipublikasikan dalam situs resmi ini.



Gambar 5: Situs resmi Hizbut Tahrir Indonesia (Sumber: <https://hizb-indonesia.online/>, 2020)

Penggunaan situs resmi di internet memang merupakan ciri khas dari kelompok agama di era digital seperti sekarang ini. Karena ketika agama mulai masuk ke internet, situs menjadi media wajib yang harus dimiliki karena berisikan informasi penting yang sifatnya satu arah (Iqbal, 2016). Melalui situs inilah biasanya umat agama akan mengetahui informasi resmi yang dikeluarkan otoritas agama mereka. Begitupun bagi HTI, sebuah situs resmi akan memfasilitasi mereka untuk menggambarkan dinamika gerakan mereka di Indonesia. Sayangnya, pasca dibubarkan pemerintah pada 2017 silam, situs resmi HTI sudah dihilangkan oleh pemerintah. Kini setiap anggota tidak bisa lagi memperoleh informasi resmi dari situs ini. Informasi penting dan beragam berita resmi kini diperoleh hanya melalui media sosial pesan berantai yaitu Whatsapp dan Telegram. Melalui kedua media sosial ini, aktivitas HTI aman dari jangkauan pemerintah dan publik. Meskipun demikian, penghilangan situs mereka oleh pemerintah juga dirasa tidak terlalu berdampak buruk bagi organisasi, hal ini dapat dilihat karena HTI masih dengan luhainya tetap berperan besar dalam pengarusutamaan opini di Internet. Mereka sadar bahwa situs tidak lagi efektif dalam membeberkan informasi karena sifatnya satu arah saja, padahal di era sekarang informasi identik bisa dinikmati karena sifatnya yang dua arah. Inilah yang disadari oleh HTI sehingga mereka lebih fokus pada ranah media sosial yang sifatnya—komunikasi dua arah.

#### b. Media Sosial

Sadar akan statusnya yang sudah dibubarkan pemerintah, media sosial akhirnya menjadi solusi utama bagi konsistensi kampanye HTI (Dulkiah & Setia, 2020). Media sosial merupakan lingkungan yang sangat bebas dan universal, tidak ada larangan bagi siapapun untuk mengekspresikan gagasan dan idenya di media ini. Akibatnya, media sosial menjadi ajang bagi perebutan pengaruh yang sifatnya sangat efektif. Pergulatan HTI di media sosial sangat efektif sekali dan bahkan mengalami fase kesuksesannya dalam dakwah mereka. Terbukti, branding tokoh-

tokoh muda HTI sangat berhasil mereka lakukan. Banyak tokoh pemuda yang berafiliasi ke HTI sangat berhasil mempengaruhi opini publik, mereka juga menjadi tokoh panutan kaum milenial hijrah di wilayah perkotaan. Misalnya saja Felix Siaw, tokoh sekaligus cendekiawan HTI ini sangat luas dikenal publik dengan cara-cara ceramahnya yang menggugah kaum muda. Berkat ceramah dan pembawaannya, Felix Siaw akhirnya banyak digemari kaum Muslim milenial perkotaan.

Selain itu, penggunaan media sosial juga menjaid sangat identik dengan HTI melalui peran mereka yang selalu signifikan di jagat maya. Di Twitter, HTI telah beberapa kali menjadikan isu tertentu sebagai topik utama (trending topic), di Youtube mereka juga piawai menyajikan konten-konten ringan namun sarat makna. Di Instagram, tokoh-tokoh muda mereka juga piawai dan menjadi trendsetter opini Islam. Di Whatsapp dan telegram, HTI juga getol memproduksi artikel-artikel keislaman dari sudut pandang mereka dan dijadikannya sebagai pesan berantai. Semua upaya mereka selalu bermuara pada kampanye penegakkan khilafah di Indonesia (Setia, 2021b).

Upaya optimalisasi media sosial oleh HTI ini sekaligus mengaplikasikan tesis mengenai *Cyber Islamic Environment (CIE)* (Bunt, 2003). Konsep ini merupakan sebuah lingkungan baru Islam di dunia siber atau maya yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Konsep ini juga menghendaki siapa saja—memiliki identitas Muslim untuk menjadikan Islam tersebar di dunia maya, bahkan apapun jenis pesan Islamnya. Oleh karena itu, senada demikian HTI yang beridentitaskan Islam mampu memanfaatkan lingkungan baru ini dengan ajang kampanye mereka di media sosial. Dengan demikian, tidak bisa dibantah lagi bahwa HTI merupakan organisasi yang melek pada penggunaan media-media digital untuk pencapai tujuan mereka. Makanya, organisasi lainnya yang memiliki karakter moderat atau bahkan semua Muslim Indonesia yang peduli pada ancaman pesan yang digalakkan HTI harus masuk ke media sosial dan melakukan kontra narasi agar pesan-pesan Islam yang dibalut HTI tidak semakin meluas dan mempengaruhi opini publik (Rahman & Setia, 2021; Komara, 2021).

## KESIMPULAN

Sebagai organisasi yang mengidentifikasi dirinya untuk memperjuangkan kembali Islam dalam bentuk formal dan kaku, Hizbut Tahrir telah masuk ke berbagai negara di dunia dengan bermodalkan cita-cita mulia, “Untuk Melanjutkan Kehidupan Islam”. Cita-cita ini yang kemudian “membius” umat Islam di dunia agar mau bergabung dan terlibat memperjuangkannya. Inilah mengapa organisasi ini disebut sebagai organisasi transnasional yang menyebar kepenjuru dunia, termasuk Indonesia. Kehadirannya di Indonesia membawa perubahan serius pada dinamika kehidupan nasional apalagi melalui kampanye-kampanye mereka yang signifikan. Sebelum dibubarkan pemerintah Indonesia pada 2017, fase kesuksesan telah dirasakan HTI melalui dominasi kampanye-kampanye opini mereka yang bersifat langsung langsung dan tidak langsung. Pertama-tama, kampanye khilafah melalui acara-acara besar mereka hadirkan sebagai kampanye langsung. Mereka berhasil menghadirkan orang-orang dan berhasil merekrut mereka untuk sama-sama memperjuangkannya. Indikasi keberhasilannya terlihat dari ragam acara dna jumlah peserta yang amat besar. Memang, adanya kehidupan yang demokratis menyebabkan mereka terhindar dari sentimen pemerintah dan ormas lainnya. Untuk memperkuat kampanye, media cetak dan elektronik selanjutnya digunakan sebagai ajang kampanye khilafah agar jangkauannya semakin luas. Beberapa majalah mereka keluarkan untuk menambah nuansa perjuangan menegakkan khilafah. Tidak lupa, media elektronik yang fokus pada penggunaan internet juga mereka galakkan dan mendapatkan respon positif luas dari publik. Ini karena strategi pada branding tokoh dan penyajian konten-konten di medsos menarik perhatian luas dan diterima oleh publik.

Barulah situasi berubah setelah HTI resmi dibubarkan pemerintah, kampanye khilafah mereka menjadi terkendala seiring larangan demi larangan yang diterima. Oleh sebab itu, media sosial—karena kebebasannya dijadikan HTI sebagai instrumen kampanye yang utama. HTI memanfaatkan media sosial karena memperoleh kesuksesan besar tatkala mereka masih beroperasi sebelum dibubarkan. Startegi ini kemudian mereka ambil dan lanjutkan agar kampanye mereka dan perjuangan mereka tidak putus di tengah jalan. Konteks HTI ini jelas merupakan ancaman nyata dan luar biasa bagi kehidupan Indonesia yang multikultural dan demokratis. Ide-ide HTI jika terus dibiarkan akan membesar dan membius masyarakat Indonesia yang bermayoritaskan Muslim. Apalagi kepiawaian mereka dalam menggunakan dan memanfaatkan media sosial sangat baik. Makanya, ormas lainnya—baik yang arus utama maupun bukan, lemabag agama, serta para individual Muslim harus melawan narasi-narasi yang digalakkan Hizbut Tahrir Indonesia melalui kampanye-kampanye Islam yang moderat atau melalui kampanye moderasi beragama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. H. (2014). *Studi Dasar-dasar Pemikiran Islam*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Ahnaf, M. I. (2009). Between revolution and reform: The future of Hizbut Tahrir Indonesia. *Dynamics of Asymmetric Conflict*, 2(2), 69–85. <https://doi.org/10.1080/17467580902822163>
- Al-Rasheed, M., Kersten, C., & Shterin, M. (2012). *Demystifying the caliphate: Historical memory and contemporary contexts*. Oxford University Press.
- An-Nabhani, T. (1996). *Sistem Pemerintahan Islam; Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*. Al Izzah.
- An-Nabhani, T. (2001). Mafahim Hizbut Tahrir. *TK: Hizbut Tahrir*.
- An-Nabhani, T. (2011). *Nizham Al-Islam*. HTI-Press.
- An-Nabhani, T. (2016). *At-Takattul Al-Hizbiy*. HTI-Press.
- Anwar, A. S. (2010). *Aktivitas Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia Dewan Pimpinan Daerah ( DPD ) Bogor*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Arief B. Iskandar. (2015). *Materi Dasar Islam Islam Mulai Akar Hingga Daunnya*. Al Azhar Press.
- Arifianto, A. R. (2017). *Banning Hizbut Tahrir Indonesia : Freedom or Security ?* 1–3.
- Baran, Z. (2005). Radical Islamists in Central Asia. *Current Trends in Islamist Ideology*, 2, 41–58.
- Belhaj, S. A. (2015). *Menegakkan Kembali Negara Khilafah Kewajiban Terbesar Dalam Islam*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Budiman, Musyarif, & Firman. (2016). Ideologi Buletin Dakwah Al-Islam Dalam Kajian Wacana Kritis. *Kuriositas*, 9(1), 21–34.
- Bunt, G. R. (2003). *Islam in the digital age: E-jihad, online fatwas and cyber Islamic environments*. Pluto Press.
- Burhani, A. N. (2017). The Banning of Hizbut Tahrir and the Consolidation of Democracy in Indonesia. *ISEAS Perspective*, 71, 1–10.
- Cohen, A. (2003). Promoting freedom and democracy: fighting the war of ideas against Islamic terrorism. *Comparative Strategy*, 22(3), 207–221.
- Delphine Alles. (2015). *Transnational Islamic Actors and Indonesia's Foreign Policy*. Routledge., <https://doi.org/10.4324/9781315764986>
- Dodiman, M. A. (2012). *Memoar Pejuang Syariah Dan Khilafah Biografi Ringkas Tokoh Senior Huzbut Tahrir*. Al Azhar Press.
- Dulkiah, M., & Setia, P. (2020). Pola Penyebaran Hoaks pada Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi Islam di Kota Bandung. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 6(2), 1–16.
- Durkheim, E. (2011). *Durkheim on Religion: A selection of readings with bibliographies and introductory remarks*. ISD LLC.
- Ehrenfeld, R., & Lappen, A. (2006). The truth about the Muslim Brotherhood. *FrontPageMagazine. Com*.
- Erwin Wahyu. (2016, April). Mukhtar Tokoh Umat 1437 H Bogor. <https://hizb-Indonesia.online>.
- Farida, F. (2017). Potret Tafsir Ideologis di Indonesia; Kajian Atas Tafsir Ayat Pilihan Al-Wa'ie Oleh: *Nun : Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 3(1), 117–142.
- Fealy, G. (2005). Radical Islam in Indonesia: History, ideology and prospects. *ASPI Local Jihad: Radical Islam and Terrorism in Indonesia*. Retrieved from [https://www.Aspi.Org.Au/publications/local-Jihad-Radical-Islam-and-Terrorism-inindonesia/21619\\_ASPI\\_S4\\_Jihad.Pdf](https://www.Aspi.Org.Au/publications/local-Jihad-Radical-Islam-and-Terrorism-inindonesia/21619_ASPI_S4_Jihad.Pdf).
- Firdaus, M. (2018). Pola Komunikasi Aktivistis Hizbut Tahrir Dalam Mengembangkan Da'wah Islam. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(3).
- Gunaratna, R. (2004). Al-Qaeda: Organization and Operations. In *Global Responses to Terrorism* (pp. 55–69). Routledge.
- Hannah, H. A. &. (2009). Hizb Ut-Tahrir Ideology and Strategy. In *The Wiley-Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements*. The Centre for Social Cohesion. <https://doi.org/10.1002/9780470674871.wbespm308>
- Hayati, N. (2017). Konsep khilafah islāmiyyah hizbut tahrir indonesia: Kajian living al-qur'an perspektif komunikasi. *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 12(1), 169–200.
- Hernandez, Y. (1999). *The Rise of Social Media & YouTube Dawah*. <http://www.hizb-Ut-Tahrir.info/>.
- Hilmy, M. (2014). Akar-akar Transnasionalisme Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.15642/islamica.2011.6.1.1-13>
- Hine, C. (2008). Virtual ethnography: Modes, varieties, affordances. *The SAGE Handbook of Online Research Methods*, 257–270.
- Hirzi, A. T. (2005). Komparasi Ringkas Antara : Demokrasi Ala Barat Dengan Musyawarah Dalam Islam. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, XXI(2), 250–261.

- Iqbal, A. M. (2016). WHEN RELIGION MEETS THE INTERNET. *Jurnal Komunikasi Islam*, 6(01).
- John L. Esposito dan John O. Voll. (1996). *Islam and Democracy*. Oxford University Press.
- Karagiannis, E., & McCauley, C. (2006). Hizb ut-Tahrir al-Islami: Evaluating the threat posed by a radical Islamic group that remains nonviolent. *Terrorism and Political Violence*, 18(2), 315–334.
- Khalid, A. M. (2015). *Soal Jawab Seputar Gerakan Islam*. Al Azhar Press.
- Komara, F. (2021). *Buzzer and Social Media Dystopia in Indonesia*. [Http://www.hizb-Ut-Tahrir.info/](http://www.hizb-Ut-Tahrir.info/).
- Maksum, A. (2017). Discourses on Islam and democracy in Indonesia: A study on the intellectual debate between Liberal Islam network (JIL) and Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), 405–422. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.405-422>
- Muhajir, K. H. A. (2017). *Fiqh Tata Negara Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*. IRCISOD.
- Muhtadi, B. (2009). The quest for hizbut tahrir in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 37(4), 623–645. <https://doi.org/10.1163/156853109X460219>
- Mulyar, B. K. (n.d.). *Diskursus Khilafah Islamiah Di Indonesia (analisis Wacana Kritis Buletin Dakwah Al-Islam, kaffah, dan Tabloid Media Umat)*. 1–15.
- Osman, M. N. M. (2009). Reviving the Caliphate in the Nusantara: Hizbut Tahrir Indonesia's Mobilization Strategy and Its Impact in Indonesia. *S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS)*, 171, 1–34. <https://doi.org/10.7202/003033ar>
- Pranowo, M. B. (2006). Islam di Indonesia: Mengusung Demokrasi dengan Basis Budaya. *Studia Islamika*, 13(1). <https://doi.org/10.15408/sdi.v13i1.579>
- Rahman, M. T., & Setia, P. (2021). Pluralism in the Light of Islam. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(2).
- Sabari. (2017). Manajemen Media Massa Hizbut Tahrir Indonesia. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 53–72. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>
- Setia, P. (2020). *Islamic-buzzer dan hoaks: Propaganda khilafah oleh eks HTI Kota Bandung di Jawa Barat*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setia, P. (2021a). Kampanye Moderasi Beragama Melalui Media Online: Studi Kasus Harakatuna Media. In P. Setia & R. Rosyad (Eds.), *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital* (1, pp. 167–180). Prodi P2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Setia, P. (2021b). Membumikan Khilafah di Indonesia: Strategi Mobilisasi Opini Publik oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Media Sosial. *Journal of Society and Development*, 1(2), 33–45.
- Shalih, H. (2010). *Mengadili Demokrasi*. Pustaka Thariqul Izzah.
- Shobron, S. (2014). Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, 15(1), 44–62.
- Tilly, C. (1979). *Social movements and national politics*.
- Valentine, S. R. (2010). Monitoring Islamic Militancy: Hizb-ut-Tahrir: "The Party of Liberation." *Policing*, 4(4), 411–420. <https://doi.org/10.1093/police/paq015>
- Ward, K. (2009). Non-violent extremists? Hizbut Tahrir Indonesia. *Australian Journal of International Affairs*, 63(2), 149–164. <https://doi.org/10.1080/10357710902895103>
- Whine, M. (2006). Is Hizb ut-Tahrir Changing Strategy or Tactics? *Center for Eurasian Policy Occasional Research Paper*. Washington DC, Hudson Institute Center for Eurasian Policy, 1, 1–11.
- Wulandari, I. (2015). Pemuda Islam Harus Sukses Dunia Akhirat. <https://khazanah.republika.co.id>.
- Zaim, M. (2019). Dynamics Development of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) and Indonesia's Economic Reality. *Journal of Philosophy, Culture and Religion*, 41, 13–19. <https://doi.org/10.7176/jpcr/41-03>
- Zainuddin, M. (2018). Islam dan Demokrasi (Telaah Implementasi Demokrasi di Negara Muslim). *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.18860/ua.v4i2.6127>



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).